

**HUKUM MENUKAR DAN MERUBAH FUNGSI TANAH
WAKAF MASJID**

**(Studi Kasus Di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar S1



Oleh :

AGUS HIDAYATULLAH
102111071

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Prof. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.
7606405

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Hidayatullah
NIM : 102111071
Fakultas/jur : Syariah / Ahwalu Syahsiyah
Judul Skripsi : **HUKUM MENUKAR DAN MERUBAH FUNGSI TANAH WAKAF MASJID (Studi Kasus Di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini kami setuju dan mohon agar segera disajikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bidang Substansi Materi

Semarang, 26 Oktober 2015
Pembimbing,
Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP: 19590714 198603 1 004



Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP: 19730730 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Agus Hidayatullah
NIM : 102111071
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Judul skripsi : Hukum Menukar Dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid
(Studi Kasus di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 17
Desember 2015.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun
akademik 2015/2016.

Semarang, 17 Desember 2015

Ketua Sidang

Drs. H. Achmad Ghozali, M.S.I
NIP. 19530524 199303 1 001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

Penguji I

Dr. H. Tolkhathul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005

Penguji II

Nur Hidayati Setvani, SH., HM
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP: 19590714/198603 1 004

Pembimbing II

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP: 19730730 200312 1 003



DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 26 Oktober 2015



Agus Hidayatullah

NIM. 102111071

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha penyayang lagi maha pengasih. Sholawat beserta salam senantiasa penulis curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang diutus untuk menyebarkan Islam dan menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia.

Proses yang telah penulis lalui untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulis mengakui, tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait, skripsi dengan judul “Hukum Menukar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan) ini tidak akan terselesaikan. Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala hormat, terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
3. Anthin Lathifah, M. Ag. selaku kakur Hukum Perdata Islam dan Moh. Shoim, S.Ag., M.Hum. selaku sekur Hukum Perdata Islam.

4. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA selaku pembimbing I dan Dr. H. Ali Imron, M. Ag selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku dosen wali yang selama ini telah menasehati dan mengarahkan penulis selayaknya orang tua kepada anaknya.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang selama ini telah membagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis di bangku kuliah. Serta segenap karyawan yang telah membantu menyelesaikan admisintrasi.
7. Orang tua tercinta, Ayah, Mochamad Zamroni dan ibu, Indayati yang selalu memberikan semangat, doa restu, cinta kasih sayang dan segala yang terbaik untuk penulis.
8. Om Zuhruddin, Mas Arja, Mas Agus, Mas Lukman yang sudah membantu dan memberi pengarahan kepada penulis.
9. LMD yang selalu memberikan do'a dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan yang telah lulus terlebih dahulu, Farid Wajdi, Joko Purnomo Hadi, Nizam Al Ghifari, Eko Setyo Wibowo, Iqbal Susanto Heri, Dimas Ahmad Muhamad Dimiyati, Reza Burhan, dan Felik Efendy, ESDA, Gendut, Ucup, Iskandar, Dani, Rizal, Tido, serta teman kost Big House

lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan inspirasi di setiap waktu kepada penulis.

11. Cah Selo, Adi, Yayad, Wawan, Lukman, Shobar yang selalu menghibur dan menggoda penulis untuk eksplor keindahan Batang.
12. Keluarga besar ASb 10 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu bersama melewati masa-masa saat masih di kelas sampai akhir perjuangan penyelesaian skripsi.
13. Si hitam manis, yang selalu mengantar dan menemani kemanapun penulis pergi.

Semoga amal baik yang diberikan kepada penulis memperoleh balasan dari Allah SWT. Amin.

Semarang, 26 Oktober 2015

Agus Hidayatullah
102111071

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta, Ayah Mochamad Zamroni dan Ibu Indayati yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a di setiap waktunya serta arahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Adikku Loethfian Muhammad Qori, yang selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat kepada penulis.

Keluarga besar penulis, Kakek, Mamak, Mbah, Yu Eny, Yu Yayah, Bulek Rini, Bulek Roh, Om Zuhudin, Om Nasir, Om Ari, dan ponakan ponakan penulis, Ima, Haykal, Ahnaf, Nazwa, dan Zuhdan yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Direktur Utama Big House, Pak Asro'I beserta keluarga yang telah mengizinkan tinggal selama beberapa tahun ini. Teman-teman seperjuangan yang telah meninggalkan saya terlebih dahulu, Farid Wajdi, Joko Purnomo Hadi, Nizam Al Ghifari, Eko Setyo Wibowo, Iqbal Susanto Heri, Dimas Ahmad Muhamad Dimyati, Reza Burhan, dan Felik Efendy, ESDA, Gendut, Ucup, Iskandar, Dani, Rizal, Tido, serta teman kost Bis House lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan inspirasi di setiap waktu kepada penulis. Seluruh Kawan dan sahabat seperjuangan terutama teman-teman ASb 10 yang selalu tetap semangat.

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan
apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah
mengetahuinya.

(Q.S. ali-Imran ayat 92)

ABSTRAK

Penelitian yang penulis lakukan berjudul “Hukum Menukar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat pengurus masjid, tokoh agama dan nadzir tentang hukum menukar dan merubah fungsi tanah yang semula masjid menjadi halaman masjid atau tempat parkir untuk kemaslahatan masjid tersebut, serta untuk mengetahui hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf masjid dalam pandangan Hukum Islam.

Dalam penelitian ini diajukan dua rumusan masalah, yakni: bagaimana pendapat dan dasar hukum pengurus masjid, tokoh agama, dan nadzir tentang hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf yang semula berupa masjid menjadi halaman masjid atau tempat parkir untuk untuk kemaslahatan masjid tersebut tersebut?. Bagaimana hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf masjid dalam pandangan Hukum Islam?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara mula-mula disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memahami hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf masjid para pengurus masjid, tokoh agama dan nadzir membolehkan. Mereka mengacu kepada madzhab Hambali dan madzhab Hanafi yang membolehkan penukaran tanah wakaf sepanjang ada kemaslahatan. Karena mereka pada umumnya menggunakan prinsip maslahat untuk menjaga harta wakaf tersebut. Dalam hal hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf Masjid Desa Simbang Wetan dalam pandangan Islam, dalam kenyataannya belum sesuai secara prosedur, karena harta wakaf tersebut belum didaftarkan ke KUA untuk mendapatkan AIW dan dalam hal perubahan harta wakaf nadzir tidak melakukan izin kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia.

Kata Kunci : *Pewakafan, Menukar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Telaah Pustaka	19
E. Metode Penelitian.....	24
F. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf	31
B. Dasar Hukum Wakaf	35
C. Syarat dan Rukun Wakaf.....	43
D. Perubahan Harta Wakaf.....	59

**BAB III : MENUKAR DAN MERUBAH FUNGSI TANAH
WAKAF MASJID DESA SIMBANG WETAN
KECAMATAN BUARAN KABUPATEN
PEKALONGAN**

- A. Profil Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten
Pekalongan 65
- B. Pendapat dan Dasar Hukum Pengurus Masjid, Tokoh Agama,
Nadzir Tentang Hukum Menukar dan Merubah Fungsi Tanah
Wakaf Masjid Yang Semula Berupa Masjid Menjadi Halaman
Masjid atau Tempat Parkir Untuk Kemaslahatan Masjid
Tersebut..... 73
- C. Hukum Menukar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid
Dalam Pandangan Hukum Islam 80

**BAB IV : ANALISIS HUKUM MENUKAR DAN MERUBAH
FUNGSI TANAH WAKAF MASJID DESA SIMBANG
WETAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN
PEKALONGAN**

- A. Analisis Pendapat dan Dasar Hukum Pengurus Masjid, Tokoh
Agama, Nadzir Tentang Hukum Menukar dan Merubah Fungsi
Tanah Wakaf Masjid Yang Semula Berupa Masjid Menjadi
Halaman Masjid atau Tempat Parkir Untuk Kemaslahatan
Masjid Tersebut..... 89
- B. Analisis Hukum Menukar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf
Masjid Dalam Pandangan Hukum Islam 100

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
C. Penutup	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Simbang Wetan merupakan desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang ada dan beberapa bangunan keagamaan di berbagai sudut tempat, seperti masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, dan lain-lain. Dengan keberadaan bangunan tersebut maka tidak terlepas dari praktek perwakafan, karena biasanya masyarakat lebih mempercayakan hartanya untuk wakaf tempat ibadah dari pada wakaf yang lain. Hal ini mengingat bahwa wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima`iyah (ibadah sosial).

Wakaf ialah amal sosial yang konseptual dan produktif. Wakaf salah satu amal sosial yang memiliki visi kedepan, memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan

yang berkelanjutan, amal ini dapat mendorong terwujudnya kemaslahatan yang lebih besar, mengingat pelaksanaannya didasarkan pada kesadaran berinvestasi akhirat, dan distribusinya mementingkan berbagai kegiatan produktif. Wakaf juga salah satu bentuk kemurahan hati, karena praktik wakaf merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bentuk pengeluaran harta yang sangat disukainya tanpa imbalan.¹

Selain itu wakaf juga merupakan ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya.²

Wakaf juga merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi wakif (orang yang mewakafkan) walaupun orang yang

¹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 71

² Mohammad Abdul Halim, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, hlm 77

bersangkutan sudah meninggal dunia. Dengan dianjurkannya wakaf, maka tidak sedikit orang yang mempunyai kelebihan harta bendanya kemudian menginfestasikan sebagian hartanya tersebut di jalan Allah melalui wakaf dengan berbagai macam bentuk.

Menurut Imam Nawawi wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.³

Bahwa fungsi dari harta wakaf merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pada dasarnya tujuan dari perwakafan itu sendiri adalah mempergunakan manfaat dari harta wakaf untuk kebaikan, baik kebaikan dalam hal peribadatan maupun sosial dengan dasar ajaran agama Islam. Tingkat kemanfaatan dari perwakafan dapat dipengaruhi oleh nilai manfaat yang terkandung di dalam benda wakaf itu

³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm 54

sendiri, kekekalan benda wakaf, maupun juga dapat dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola wakaf atau nadzir.

Menurut Al-Murghinany wakaf adalah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habsul'aini ala malik al-wakil wa tashaduq bi al-manfa'ah*).⁴

Menurut Ibn Arafah wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pegadaian).⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 tentang wakaf tanah. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka

⁴ *Ibid*, hlm 55

⁵ *Ibid*, hlm 55

waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁶

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan (mensedekahkan) manfaat untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Pendapat Abu Hanifah, suatu harta yang telah diwakafkan tidak terlepas dari kepemilikan si wakif bahkan ia boleh menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Karena wakaf itu hukumnya jaiz, tidak wajib dan samalah halnya dengan pinjam meminjam ('ariyah).⁷

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam, ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi ubudiyah ilahiyah, ia juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2011, hlm 183

⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat pres, 2005, hlm 9

yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia.⁸

Menurut Muhammad bin al-Hasan, wakaf dianggap sah jika barang yang diwakafkan dikeluarkan dari tangannya, yaitu dengan menyerahkan kepada pengurus wakaf dan menjadikannya sebagai pengurusnya.

Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan dan bukan pula hak milik nadzir atau lembaga pengelola wakaf tapi menjadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dapat di nikmati oleh pihak yang berhak menerima hasil wakaf.

Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara pendekatan diri kepada Allah. Mereka yang jahiliah tidak mengenal wakaf, tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah SAW,

⁸ *Ibid*, hlm 2-3

karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.⁹

Menurut Syafi'i, Malik, dan Ahmad, wakaf itu suatu ibadah yang disyariatkan. Dan bahkan hukumnya sunah. Ini didasarkan dari pengertian-pengertian umum ayat-ayat al-Quran maupun beberapa hadis yang secara khusus berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf di zaman Rasulullah.¹⁰

Nabi juga telah menegaskan dalam hadisnya telah menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar ra untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, "Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa sahabat Ibnu Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu maka

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm 423

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 55

apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, “Bila kamu suka kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian, Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar, “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).¹¹

Kendatipun tidak jelas dan tegas wakaf disebutkan dalam al-Qur'an, namun beberapa ayat yang memerintah manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Di dalam al-Qur'an surah al-Haj (22) ayat 77 Tuhan memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan supaya hidup manusia itu bahagia. Disurah lain Allah memerintahkan manusia untuk

¹¹ Elsi Kartika Sari, *Op. cit.*, hlm 57

membelanjakan (menyedekahkan) hartanya yang baik (2 : 267). Dalam surah ali-Imran (3) ayat 92 Tuhan menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali jika ia menyedekahkan sebagian dari harta yang disenanginya (pada orang lain). Ayat-ayat al-Qur'an tersebut, menurut pendapat para ahli, dapat digunakan sebagai dasar umum lembaga wakaf.¹²

QS al-Hajj ayat 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ
وَفَعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS al-Hajj : 77)”*¹³

¹² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, hlm 80-81

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005, hlm 272

QS al-Baqarah ayat 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”. (QS al-Baqarah : 267)¹⁴

QS ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن
 شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang*

¹⁴ Ibid, hlm. 35

kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS ali-Imran : 92)¹⁵

Dalam konsep Islam, wakaf juga di kenal istilah jariyah artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau wakaf yang di keluarkan, sepanjang benda wakaf itu di manfaatkan, untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif, mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia.¹⁶

Tujuan yang sebenarnya dalam melakukan wakaf ialah untuk mendapatkan pahala dalam pandangan Allah. Oleh sebab itu, tiap-tiap tujuan yang dianggap oleh hukum Islam sebagai bersifat keagamaan, suci atau amal saleh, akan dianggap sebagai tujuan yang sah, Ameer Ali sebagaimana di kutip Asaf A A Fyzee, menjelaskan hal ini dengan menyatakan bahwa tindakan suci mungkin berupa suatu senyuman di muka seorang tetangga atau merupakan bantuan

¹⁵ *Ibid*, hlm 49

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 492

kepada seorang yang lelah, tetapi dalam hukum Islam ini, berarti suatu pengorbanan atau pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kerelaan dari Allah atau suatu balasan di akherat nanti.¹⁷

Di Indonesia, wakaf pada umumnya, berupa benda-benda konsumtif, bukan barang-barang yang produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Ini disebabkan karena beberapa hal, di antaranya adalah (di Jawa misalnya) tanah telah sempit dan di daerah-daerah lain, menurut hukum adat (dahulu), hak milik perorangan atas tanah dibatasi oleh hak masyarakat hukum adat.¹⁸

Harta yang diwakafkan harus berupa benda-benda tidak bergerak atau benda-benda bergerak yang memiliki karakter lestari, karena tujuan wakaf yang disediakan untuk jangka waktu yang relatif lama.

¹⁷ Asaf A. A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tintamas, 1966, hlm 102-103

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Op. cit.*, hlm 96

Abu Hanifah berpendapat, bahwa harta yang telah diwakafkan boleh ditarik kembali oleh wakifnya, dan harta itu tetap menjadi miliknya. Oleh karenanya si wakif mempunyai wewenang untuk menstransfer hartanya yang telah diwakafkannya itu.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka menurut Abu Hanifah bahwa, mewakafkan harta itu sama dengan meminjamkannya. Jadi institusi wakaf dalam hal ini sama dengan institusi pinjam-meminjam. Hanya perbedaan antara wakaf dengan pinjam-meminjam ialah, bahwa pada wakaf bendanya ada pada wakif sedangkan pada pinjam meminjam bendanya ada pada orang yang meminjam, yaitu orang yang memanfaatkan harta, yang diberi hak untuk mengambil manfaat benda yang dipinjamkannya itu.

Berbeda dengan mewakafkan untuk masjid, itu adalah hak Allah, mewakafkan masjid atau benda untuk dijadikan masjid berarti mengembalikan kedudukan harta dijadikan masjid itu kepada kedudukannya yang asli, yakni hak Allah.

Alasan lain yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif dengan analogi.

Apabila dengan wakaf diartikan dengan menahan harta dan benda itu lepas dari miliknya, dengan tidak diperbolehkan mentransaksikannya, hal itu sama dengan sa'ibah, yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Bahwa wakaf sebagai aqad tabarru' yaitu transaksi dengan melepaskan hak, bukan berarti melepaskan hak atas benda pokoknya, melainkan yang dilepaskan hanyalah hasil dan manfaat daripada benda pokok (asal) yang diwakafkan itu. Seperti wakaf sawah, bukan sawahnya yang disedekahkan, yang dilepaskan darinya, melainkan padi atau hasil tanaman atau hasil lain yang dihasilkan dari sawah yang diwakafkan itu. Karenanya benda pokoknya, seperti sawah pada wakaf sawah, tetap menjadi milik orang yang mewakafkan dan dia

mempunyai hak penuh atas hartanya itu untuk mentransaksikan harta miliknya itu.¹⁹

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa benda wakaf itu boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Misalnya suatu masjid yang tidak dapat lagi digunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu membangun masjid yang baru.²⁰

Dasar pemikiran Ibnu Taimiyah sangat praktis dan rasional. Pertama, tindakan menukar dan menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. Kedua, karena kepentingan mashlahat yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun masjid yang baru yang lebih luas atau lebih baik. Dalam hal ini mengacu kepada tindakan Umar Ibn al-Khaththab ketika ia

¹⁹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 242-244

²⁰ Muhammad Jawad al-Mugniyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah 'ala Mazahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1964, hlm. 333

memindahkan masjid Kufah dari tempat lama ke tempat yang baru. Usman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap masjid Nabawi.

Tentang perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, di kalangan para ahli hukum (fikih) Islam mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai *shadaqah jariyah*, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Dengan perubahan itu, status benda itu sebagai harta wakaf pada hakikatnya tidaklah berubah. Misalnya, dengan menukar tempat tanah wakaf, status wakaf tidaklah berubah, karena dengan pertukaran tempat itu seakan-akan tanah wakaf itu dipindahkan ke tempat lain. Ini mungkin terjadi sebab status tanah di tempat asalnya tidak dapat dipertahankan lagi. Memindahkan bangunan ke tempat lain atau menukar suatu

bangunan dengan bangunan ditempat lain karena tidak dapat lagi dimanfaatkan pada hakikatnya tidaklah mengubah status wakaf.²¹

Di Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, ada sebuah masjid kuno yang terletak di tepi jalan raya, sehingga apabila sewaktu-waktu ada pelebaran jalan, pasti masjid tersebut akan digusur. Untuk mengantisipasi hal tersebut, takmir masjid membentuk panitia pembangunan yang melakukan pemugaran total, dengan cara:

- Setengah dari masjid tersebut, yaitu bagian depan, akan dijadikan halaman dan tempat parkir, karena masjid tersebut sekarang ini tidak mempunyai halaman dan tempat parkir.
- Setengah dari masjid bagian depan yang dijadikan halaman tersebut, diganti dengan tanah wakaf yang berada di belakang masjid tersebut. Kemudian masjid yang baru dibuat dua tingkat dan tingkat yang kedua

²¹ Mohammad Daud Ali, *Op. cit.*, hlm 93

berbentuk *letter U*, sehingga masjid menjadi lebih megah dan lebih besar kapasitasnya menampung jama'ah.

Melihat kondisi dan kasus di atas sangat penting untuk diteliti, dan tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam sebuah karya tulis ilmiah.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan rincian masalah yang akan di bahas dalam sebuah penelitian, hal ini bertujuan agar masalah yang di bahas menjadi fokus dan terarah.

Setelah adanya latar belakang masalah yang telah penulis tulis di atas, maka permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah:

1. Bagaimana pendapat dan dasar hukum pengurus masjid, tokoh agama, nadzir tentang hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf yang semula berupa masjid menjadi halaman masjid atau tempat parkir untuk kemaslahatan masjid tersebut?

2. Bagaimana hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf masjid dalam pandangan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat dan dasar hukum pengurus masjid, tokoh agama, nadzir tentang hukum menukar dan merubah fungsi tanah yang semula berupa masjid menjadi halaman masjid atau tempat parkir untuk kemaslahatan masjid tersebut.
2. Untuk mengetahui hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf masjid dalam pandangan Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan penelitian yang hampir sama dalam pembahasan berbentuk skripsi. Yaitu skripsi yang ditulis oleh:

1. Skripsi yang ditulis Juniyanto (2101079) yang berjudul **Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Wakaf Barang yang Digadaikan.**

Dalam skripsinya tersebut, Juniyanto mengemukakan bahwa menurut Ibnu Abidin tentang mewakafkan barang yang digadaikan adalah sah dengan syarat bahwa benda tersebut dapat diserahkan terimakan. Ibnu Abidin beristinbath hukum dengan menggunakan akal fikiran atau Ra'yu dalam memecahkan kasus-kasus yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu dengan membandingkan kasus-kasus yang tidak terdapat nash hukumnya dengan kasus-kasus yang telah ditentukan hukumnya. Juga dengan menggunakan istinbath dalam hal ini perbandingan itu beliau menetapkan hukum sebatas hal itu dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat karena pada dasarnya beliau mempermudah hubungan dengan sesamanya dalam ibadah dan memberikan kebebasan bertindak atas suatu hak milik.

Undang-undang Republik Indonesia nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf mencantumkan hal tersebut sudah ada wakaf dalam jangka waktu tertentu. Perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam lagi dari kalangan akademika, ulama dan umara'. Karena tujuan wakaf adalah untuk tolong menolong terhadap sesama manusia, meningkatkan sarana dan prasarana kepentingan umum.

2. Skripsi yang ditulis Fadillah Nur Aini (2101092) yang berjudul **Studi Analisis Tentang Harta Wakaf Berupa Hak Cipta (Kajian Atas UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (3) huruf e)**

Dalam skripsinya tersebut, Fadillah Nur Aini mengemukakan bahwa. Di Indonesia selama ini, perwakafan telah diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Namun peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah (langsung).

Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi tumbuhnya pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan profesional, maka pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah dengan persetujuan DPR telah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai harta wakaf, karena hak cipta merupakan harta yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Disamping itu, titik tekan atau inti dari wakafitu sendiri adalah mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum.

3. Skripsi yang ditulis Muhammad syah Rofiuddin (072111032) yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikraran Kembali Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)**

Dalam skripsinya tersebut penulis mengemukakan bahwa, wakaf merupakan bagian hukum Islam yang mendapatkan pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejak Islam masuk di Indonesia, tata cara perwakafan cukup dilakukan berdasarkan ketentuan fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik. Menurut pendapat Imam Al-Syafi'i, Malik, dan Ahmad, wakaf dianggap sah dengan adanya lafadz atau sighat walaupun tidak ditetapkan oleh hakim. Namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, wakaf dianggap sah apabila pihak yang mewakafkan mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan PPAIW yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dengan melengkapi syarat-syarat administratif yang di antaranya adalah menyerahkan surat-surat tanda bukti kepemilikan harta benda. Terdapat kasus pengikraran kembali terhadap tanah wakaf yang

terjadi di Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris wakif. Skripsi diatas berbeda dengan judul penulis dan di jadikan sebagai telaah pustaka. Sedangkan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf masjid.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Berdasarkan objek kajian dalam penulisan skripsi ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengkritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. Atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang menggambarkan objek penelitian dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam

keadaan sewajarnya.²² Berpijak dari keterangan tersebut, penulis menggunakan *field research* yaitu suatu riset lapangan.

Alasan dipilihnya penelitian kualitatif ini, karena peneliti ingin memperoleh deskripsi secara langsung dan berupaya mencari fakta-fakta terhadap praktek pemanfaatan tanah wakaf masjid di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif adalah suatu cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan itu benar atau tidak berdasarkan syari'at Islam dan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan pendekatan sosiologis adalah cara pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan

²² Hasan Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet II, 1995, hlm. 67

melihat dan memahami gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang terkait dengan skripsi ini yakni:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.²³

Data primer ini diperoleh melalui wawancara :

Data dikumpulkan dengan mewawancarai tokoh agama pengurus masjid Simbang wetan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil laporan yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁴ Dalam hal ini data yang diambil yakni dari buku-buku literatur yang

²³ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-I 2004, hlm. 57

²⁴ Amirudin, Zainal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2006. hlm. 30

sesuai dengan hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf masjid.

3. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis atau hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁵

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data, yang dalam hal ini penggunaan metode:

- a. Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pemaparan atau deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam hal ini penulis bermaksud memaparkan fenonema-fenomena dan fakta-fakta yang ada dari kasus yang akan diteliti.

²⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 3, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, Cet. ke-7, hlm. 142

- b. Induktif ialah cara berfikir dari fakta yang bersifat khusus, fakta yang konkret, kemudian fakta tersebut ditarik ke generalisasi yang bersifat umum.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua kerangka teoritik mengenai tinjauan umum tentang wakaf. Bab ini penulis mengemukakan landasan teori

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, Cet. Ke 30, hlm. 42

yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yakni pengertian dan dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, perubahan harta wakaf.

Bab ketiga hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf masjid di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Dalam bab ini berisi tentang profil umum Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Pendapat dan dasar hukum pengurus masjid, tokoh agama, nadzir tentang hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf masjid yang semula berupa masjid menjadi halaman masjid atau tempat parkir untuk kemaslahatan masjid tersebut dan hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf masjid dalam pandangan hukum islam.

Bab keempat analisis hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf Masjid Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Di dalam bab ini berisi analisis pendapat dan dasar hukum pengurus masjid, tokoh

agama, dan nadzir tentang hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf yang semula berupa masjid menjadi halaman masjid atau tempat parkir untuk kemaslahatan masjid tersebut. Dan analisis terhadap hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf Masjid dalam pandangan Hukum Islam.

Bab kelima penutup. Dalam bab penutup ini terdiri atas kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa* yang artinya menahan.¹ Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.²

Wakaf menurut syara' berarti penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menahan dzat (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, atau sejenisnya.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm. 307

² Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Hussaini, *Kifayah al-Akhyar Juz 1*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 319

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia wakaf berarti tanah Negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal, benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas, hadiah atau pemberian yang bersifat suci.³

Menurut pendapat Abu Hanifah, wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan *ariah* dan *commodate loan* untuk tujuan-tujuan amal saleh.⁴

Menurut Imam Maliki, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 2002, hlm. 1266

⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 355

manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali harta wakafnya.

Menurut Imam Syafi'i, wakaf merupakan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

Menurut Imam Hambali, wakaf adalah menahan pokok dan menyalurkan hasilnya pada kebaikan. Imam Hambali merujuk pada tindakan Nabi kepada Umar bin al-Khattab ketika bertanya tentang amal apa yang terbaik untuk memanfaatkan perkebunan yang subur di Khaibar.⁵

Menurut Mohammad Daud Ali, kata wakaf berasal dari Bahasa Arab itu disamping berarti menghentikan atau berdiam di tempat juga mempunyai arti menahan sesuatu yang dihubungkan dengan harta kekayaan itulah yang dimaksud dengan wakaf. Dalam uraian ini wakaf yaitu menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.⁶

⁵ Mukhlisin Muzarie, *Op. cit.*, hlm. 79

⁶ Mohammad Daud Ali, *Op. cit.*, hlm. 80

Definisi wakaf menurut PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dalam pasal 1 ayat (1) Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁸

Bahwa dalam fiqh Islam, wakaf tidak hanya berbentuk tanah, tetapi meliputi berbagai benda lain, yang dapat diambil manfaatnya, dengan tujuan untuk mendekatkan

⁷ PP No. 28 tahun 1977 *Tentang Perwakafan Tanah Milik*

⁸ *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2011, hlm 184

diri kepada Allah, dan mentasarufkan hartanya di jalan kebajikan.⁹

Dari berbagai rumusan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa wakaf adalah menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah.

B. Dasar Hukum Wakaf

Di dalam al-Qur'an memang tidak disebutkan secara jelas mengenai perintah wakaf, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada masyarakat dipandang oleh para ulama sebagai landasan hukum perwakafan.


Adapun landasan hukumnya yaitu:

a. Al-Qur'an

Surat al-Hajj ayat 77:

⁹ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia, Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: CV Rajawali, 1989, hlm. 24

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan*”.
(Q.S. al-Hajj : 77)¹⁰

Ayat diatas mengandung perintah secara umum agar kaum muslim dapat menjalin hubungan baik dengan Allah melalui kegiatan yang telah ditetapkan dengan rukuk dan sujud serta ibadah lainnya, dan melalui kegiatan sosial lainnya seperti menjalin hubungan baik dengan sesama. Menurut ulama ahli fikh ayat ini dijadikan landasan hukum wakaf karena perintah untuk berbuat kebaikan mengandung petunjuk umum, termasuk didalamnya melaksanakan amal wakaf, mengingat wakaf merupakan implementasi hubungan baik dengan Tuhan yang sangat dianjurkan.¹¹

Surat al-Baqarah ayat 261

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, hlm. 272

¹¹ Mukhlisin Muzarie, *Op. cit.*, hlm. 81-82

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
 ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah: 261)¹²

Surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
 شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran: 92)¹³

Ayat ini menganjurkan infak secara umum, namun

para ahli fikih dari berbagai madzhab menjadikannya sebagai

¹² Ibid, hlm. 34

¹³ Ibid, hlm. 49

landasan hukum wakaf karena secara historis setelah ayat ini turun banyak sahabat Nabi yang terdorong untuk melaksanakan wakaf.¹⁴

Surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah*

¹⁴ Mukhlisin Muzarie, *Op. cit.*, hlm. 80

Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. al-Baqarah: 267)¹⁵

Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali jika ia menyedekahkan sebagian harta yang disenanginya kepada orang lain. Ayat-ayat al-Qur'an tersebut, menurut para ulama dapat dipergunakan sebagai dasar hukum perwakafan.¹⁶

b. Al-Sunnah

Hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk manahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا
بِخَيْبَرَ، فَأَتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِيبْ مَا لَا قُطْ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ قَمًا
تَأْمُرُ بِهِ، قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا." قَالَ:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 35

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Op. cit.*, hlm 81

فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، إِنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي
الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
وَالضَّيْفِ وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَّيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ
غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar R.A. bahwasanya Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada nabi Muhammad SAW untuk meminta nasehat tentang harta itu, ia berkata : “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah sebaik ini, apa nasehat engkau kepadaku tentang tanah itu? Rasulullah menjawab: “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Ibnu Umar berkata, “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (H.R. Muslim)¹⁷

Hadits Ibnu Umar memberikan petunjuk yang lebih lengkap terhadap praktik wakaf sehingga para ulama menetapkan persyaratan-persyaratan wakaf, mulai dari persyaratan pewakaf, persyaratan harta yang diwakafkan, sasaran dan tujuan wakaf sampai pada akibat hukum dari

¹⁷ Elsi Kartika Sari, *Op. cit.*, hlm 57

transaksi wakaf berdasarkan hadits ini. Hadits ini memberikan petunjuk tentang bagaimana cara mengelola wakaf dan cara mendistribusikan hasil-hasilnya.¹⁸

Wakaf yang disyari'atkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin al-Khattab mengenai hadits diatas yang mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah islam.

Hadits lain yang menjelaskan tentang wakaf adalah hadits yang diceritakan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah. Hadis tersebut sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
(رواه مسلم)¹⁹

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.” (H.R. Muslim)

¹⁸ Mukhlisin Muzarie, *Op. cit.*, hlm. 87

¹⁹ Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Sahih Muslim Juz 2*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Aalamiyah, tth, hlm.14

Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud “*shadaqah jariyah*” dalam hadits ini adalah wakaf, karena *shadaqah jariyah* mengandung harapan agar dari sedekah tersebut selalu mengalir pahalanya walaupun pelakunya telah meninggal dunia.

Selain landasan hukum wakaf tanah yang merupakan benda tidak bergerak, ada juga hadits yang menyatakan keabsahan wakaf benda bergerak. Hadist yang berasal dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh al-Bukhari, sebagai berikut:

من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا واحتسا بافاء ن شعبه وروثه
وبوله في ميزانه حسنات (رواه البخارى)

Artinya: “Barang siapa yang mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan iman dan ikhlas, maka sesungguhnya jasad, berak, dan kencingnya akan ditimbang sebagai kebaikan.”

Hadist tersebut menjelaskan ada wakaf kuda pada zaman Nabi yang merupakan satu-satunya kendaraan. Maka

dapat disimpulkan bahwa wakaf kendaraan untuk kepentingan umum pun sah menurut hukum.²⁰

C. Syarat Dan Rukun Wakaf

Wakaf dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hal ini sangat penting, karena tanpa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, maka wakaf tidak akan terwujud. Dengan perkataan lain wakaf sebagai suatu lembaga pasti memiliki unsur-unsur pembentuknya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk wakaf sekaligus merupakan rukun dan syarat wakaf.²¹

1. Rukun Wakaf

Dalam Islam, wakaf dianggap sah jika wakaf itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Adapun rukun wakaf ada 4, yaitu:

1. Wakif (orang yang berwakaf)

²⁰ Junaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1997, hlm. 12

²¹ A. Faishal Haq dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: PT. GBI, 2005, hlm. 15

2. Nadzir (orang yang mengelola benda wakaf)
3. Mauquf bih (harta yang diwakafkan)
4. Mauquf alaih (peruntukan wakaf)
5. Sighat (ikrar wakaf)²²

2. Syarat Wakaf

Rukun-rukun wakaf yang dikemukakan diatas masing-masing harus memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat nya dari tiap-tiap rukun wakaf adalah sebagai berikut:

1. Wakif (orang yang berwakaf)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Suatu perwakafan dapat dikatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan tabarru' yaitu melepaskan hak milik dari hartanya tanpa mengharapkan imbalan. Adapun syarat-syaratnya adalah:

- 1) Dewasa

²² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm. 21

- 2) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 3) Berakal sehat
- 4) Pemilik sah harta benda wakaf.²³

Wakaf tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila, idiot (lemah mental), berubah akal karena usia, sakit atau kecelakaan.

2. Nadzir (orang yang mengelola benda wakaf)

Nadzir adalah orang yang dipercaya untuk mengelola harta wakaf. Dalam undang-undang R.I. No. 41 tahun 2004 pasal 1 nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Apabila pewakaf meninggal dunia sebelum menunjuk orang lain untuk mengelola wakafnya, maka menurut al-Khatib al-Syarbini, penguasa hukum wilayah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi harta wakaf tersebut. Al-Syarbini mengemukakan alasan, karena harta wakaf adalah milik Allah, penguasa hukum wilayah

²³ *Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004, Pasal 8.*

selaku *nadzir* 'am bertanggung jawab atas harta wakaf tersebut. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, berpendapat bahwa apabila pewakaf meninggal sebelum menunjuk seseorang untuk mengelola wakafnya, maka pihak yang menerima wakaf lah yang bertanggung jawab untuk mengelolanya, bukan penguasa hukum wilayah. Alasannya, karena penerima wakaf adalah pemiliknya atau pengguna manfaatnya sehingga layak apabila diberi tanggung jawab untuk mengelola harta tersebut bertindak sebagai pemilik yang sesungguhnya.²⁴

Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, pertama tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*). Yang dimaksudkan dengan tertentu ialah, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci.

²⁴ Mukhlisin Muzarie, *Op. cit.*, hlm. 142-143

Nadzir terdiri atas nadzir perorangan, nadzir organisasi, dan nadzir badan hukum. Adapun syarat nadzir perorangan adalah adalah:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rokhani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.²⁵

Syarat nadzir organisasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan dalam nadzir perseorangan
- 2) Organisasi bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan islam
- 3) Salah seorang pengurusnya harus berdomisili di Kabupaten / Kota letak benda wakaf berada

²⁵ Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004, Pasal 10

4) Memiliki:

- a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasarnya
- b) Daftar susunan pengurus
- c) Anggaran Rumah Tangga
- d) Program kerja dalam pengembangan wakaf
- e) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau merupakan kekayaan organisasi
- f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Persyaratan nadzir badan hukum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi persyaratan nadzir perseorangan
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan islam

- 4) Terdaftar pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia
- 5) Salah seorang pengurus harus berdomisili di Kabupaten / Kota letak benda wakaf berada
- 6) Memiliki:
 - a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
 - b) Daftar susunan pengurus
 - c) Anggaran Rumah Tangga
 - d) Program kerja dalam pengembangan wakaf
 - e) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum
 - f) Surat pernyataan bersedia diaudit.

Jika nadzir berbentuk badan hukum, maka harus badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak tanahnya

yang diwakafkan. Nadzir harus terdaftar pada KUA setempat untuk mendapatkan pengesahan.²⁶

Baik nadzir perorangan maupun badan hukum, sama-sama harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Dan harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi.²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 200 nadzir mempunyai kewajiban, yaitu:

- a. Mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

²⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 353-354

²⁷ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 68

- b. Membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud di atas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Camat setempat sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Menteri Agama.

3. Mauquf bih (harta yang diwakafkan)

Benda wakaf adalah segala benda baik itu benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam.²⁸

Harta wakaf disyaratkan merupakan harta yang mempunyai nilai, milik wakif dan dapat tahan lama dalam penggunaannya, meskipun objek wakaf bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan lain. Harta tersebut juga bukan harta

²⁸ Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op. cit.*, hlm. 305

yang haram atau najis, harta yang menjadi larangan Allah karena bisa menimbulkan fitnah.²⁹

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasi oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari: benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

²⁹ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 61

- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat harta yang diwakafkan adalah sebagai berikut:

- 1) Benda itu adalah sah dari pihak yang berwakaf.

- 2) Benda yang diwakafkan itu tahan lama dan bisa diambil manfaatnya.
- 3) Benda yang diwakafkan itu harus sesuatu yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan, karena itu tidak boleh mewakafkan benda-benda yang haram.
- 4) Kadar benda yang diwakafkan tidak boleh melebihi jumlah sepertiga harta yang berwakaf, karena dapat merugikan pihak ahli waris dari pihak yang berwakaf.³⁰

Harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwim*, yaitu segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal.

³⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 109

- 2) Harta yang diwakafkan harus diketahui dengan yakin ketika diwakafkan sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
- 3) Milik wakif, hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya.

4) Terpisah bukan milik bersama.³¹

Harta benda wakaf yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- 1) Benda tidak bergerak.
- 2) Benda bergerak.³²

4. Mauquf alaih (peruntukan wakaf)

Yang dimaksud mauquf alaih adalah tujuan wakaf atau peruntukan wakaf yang harus digunakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Maka, benda-benda yang dijadikan sebagai obyek wakaf harus

³¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Op. cit.*, hlm. 26-29

³² *Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op. cit.*, hlm 190

benda-benda yang termasuk dalam bidang mendekatkan diri kepada Allah SWT.³³

Mauquf alaih juga harus jelas misalnya untuk kepentingan umum, untuk menolong orang miskin, untuk menolong anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu namun yang lebih baik adalah kalau tujuan wakaf itu jelas diperuntukkan bagi kepentingan umum, untuk kemaslahatan masyarakat.³⁴

Tujuan wakaf untuk kepentingan masyarakat seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak yatim dan sebagainya.³⁵

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 22 menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah

³³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm 241

³⁴ Mohammad Daud Ali, *Op. cit.*, hlm 86

³⁵ Ahmad Rofiq, *Op. cit.*, hlm. 497

- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.³⁶

5. Sighat (ikrar wakaf)

Sighat (ikrar wakaf) adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya, menurut Abdur-Rasyid Salim yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma.³⁷

Adapun syarat sah nya sighat adalah sebagai berikut:

- 1) Sighat harus munjazah (terjadi seketika / selesai).
- 2) Sighat tidak diikuti syarat batil (palsu).

³⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004, Pasal 22

³⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 144

- 3) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.³⁸
- 4) Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya.³⁹

Dalam pasal 5 PP No. 28 tahun 1977 menjelaskan ikrar wakaf dinyatakan:

- 1) Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.

³⁸ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hlm. 59-60

³⁹ A. Faishal Haq dan A. Saiful Anam, *Op. cit.*, hlm. 24-25

- 2) Dalam keadaan tertentu penyimpangan dari ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah lebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Agama.⁴⁰

D. Perubahan Harta Wakaf

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa perwakafan bertujuan untuk memanfaatkan sesuatu baik untuk kepentingan ibadah maupun sosial. Dan disyaratkan agar harta yang diwakafkan haruslah benda yang mempunyai nilai manfaat dan sifatnya kekal. Akan tetapi jika melihat realita yang ada bahwa tidak semua dari benda yang diwakafkan itu kekal dzatnya, contohnya saja kayu usuk untuk bangunan masjid, jendela, atau perlengkapan bangunan lainnya yang dimungkinkan akan kerusakannya suatu saat yang akan datang.

Sayyid sabiq menyatakan, bahwa apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diperlakukan

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Op. cit.*, hlm. 498

dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf mati, maka wakaf tidak diwariskan, sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf dank arena ucapan Rasulullah SAW, seperti yang disebut dalam hadis Ibnu ‘Umar, bahwa “tidak dijual, tidak dihibahkandan tidak diwariskan.”⁴¹

Dalam hadits Rasulullah dijelaskan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِيبْ مَا لَا قُطَّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْبَسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا . (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: “Tahanlah (jangan jual, hibahkan, atau wariskan) asal (pokok)nya, dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁴²

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa benda asal

atau pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan /

⁴¹ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 64

⁴² *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hlm. 62

dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, apabila suatu saat benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau sudah berkurang manfaatnya, kecuali dengan ada perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk / sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkah perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut, mengingat pentingnya menjaga amanat wakif dan sisi manfaat harta wakaf tersebut.

Dalam KHI pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. Dihibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar, atau

g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁴³

Namun dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena adanya pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang mempunyai manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.⁴⁴

Dalam fiqh Islam pada dasarnya perubahan peruntukan dan status tanah wakaf itu tidak diperbolehkan, kecuali apabila tanah wakaf tersebut tidak lagi dimanfaatkan lagi sesuai dengan tujuan wakaf, maka tanah wakaf tersebut

⁴³ *Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op. cit.*, hlm. 197-198

⁴⁴ *Abd. Shomad, Op. cit.*, hlm. 386

dapat dilakukan perubahan baik peruntukannya maupun statusnya. Dalam fiqih juga dikenal prinsip *maslahat*, yaitu memelihara maksud syara', yakni memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan. Prinsip ini dijadikan pertimbangan dalam perubahan menukar dan menjual harta wakaf untuk mencapai fingsinya sebagaimana dinyatakan si wakif.⁴⁵

Perubahan status dan penggunaan tanah wakaf tersebut harus segera dilaporkan oleh nadzir kepada Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 pasal 11.⁴⁶

Dalam PP No. 28 tahun 1977 juga menyatakan bahwa pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaan kasus tertentu dapat dilakukan dengan

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 387

⁴⁶ Juhaya S. Praja, *Op. cit.*, hlm 46

persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yang alasannya meliputi:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena untuk kepentingan umum.⁴⁷

Penyelesain perselisihan benda wakaf ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

⁴⁷ Adijani Al- Alibij, *Op. cit.*, hlm. 38

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 70

BAB III

MENUKAR DAN MERUBAH FUNGSI TANAH WAKAF MASJID DI DESA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN

A. Profil Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

a. Letak Geografis dan Kepadatan Penduduk

Desa simbang wetan merupakan salah satu desa di kabupaten pekalongan jawa tengah dengan luas wilayah 691,115 Ha. Terletak pada dataran rendah pulau jawa.¹

Adapun batas-batas desa simbang wetan adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan.

¹ Buku Monografi Desa Simbang Wetan Bulan April Tahun 2015, hlm 1.

- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Paku bulan Kecamatan Buaran.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Simbang kulon.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan.

Jumlah penduduk Desa Simbang wetan adalah 4.964 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 2.499 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.465 jiwa. Dengan jumlah KK yaitu 1.137 KK.²

TABEL I

Jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin.³

No	Kelompok umur	Jumlah Penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Usia 0 –	1181	1161	2342	47,18

² Ibid.

³ Laporan Bulanan Desa Simbang Wetan Bulan April Tahun 2015.

	19				
2	Usia 20 – 54	1118	1063	2181	43,94
3	Usia 55 ke atas	200	241	441	8,88
Jumlah Keseluruhan		2499	2465	4964	100

b. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Mata pencaharian warga Desa Simbang Wetan adalah buruh, hampir semua warga di Desa Simbang Wetan adalah buruh industri, karena di desa tersebut terdapat sebuah pabrik industri. Selain itu banyak juga yang berprofesi sebagai pedagang, banyak yang berdagang dan memiliki kios di pasar.

Di desa tersebut juga banyak terdapat industri rumahan, yaitu industri batik yang memberikan banyak lowongan pekerjaan untuk warga sekitar. Penjualan batik

nya pun juga banyak dikirim ke kota-kota sekitar Pekalongan, dan sampai dikirim ke luar pulau Jawa juga.

Dilihat dari jumlah angkatan kerjanya, Desa Simbang Wetan memiliki angkatan kerja sebanyak 3.870 orang. Dilihat dari mata pencahariannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL II

Mata pencaharian penduduk⁴

No	Jenis pekerjaan	Jumlah penduduk	Persentase (%)
1	Petani sendiri	2 orang	0,52
2	Buruh tani	4 orang	0,1
3	Nelayan	2 orang	0,52
4	Pengusaha	17 orang	0,44
5	Buruh industri	1312 orang	33,9
6	Buruh bangunan	24 orang	0,62
7	Pedagang	101 orang	2,61

⁴ *Ibid.*

8	Pengangkutan	46 orang	1,19
9	Pegawai negeri	43 orang	1,11
10	Pensiunan	11 orang	0,28
11	Lainnya	2308 orang	59,64
Jumlah		3870 orang	100

c. Kondisi Pendidikan dan Masyarakat

Kondisi pendidikan penduduk Desa Simbang wetan berdasarkan data yang diperoleh penulis dari data arsip di balai Desa Simbang Wetan, bahwa masyarakat Desa Simbang Wetan adalah masyarakat yang kebanyakan mengenal pendidikan meskipun banyak yang hanya pendidikan SD dan banyak juga yang sampai lulus akademi dan sarjana. Berikut adalah data riwayat pendidikan penduduk Desa Simbang Wetan.

TABEL III

Tingkat pendidikan penduduk ⁵

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tamat TK	219 orang	5,65
2	Tamat SD	1.025 orang	26,36
3	Tamat SMP	634 orang	16,31
4	Tamat SMA	576 orang	14,81
5	Lulus Akademi / D1-D3	67 orang	1,72
6	Lulus S1	52 orang	1,34
7	Lulus S2	10 orang	0,26
8	Lulus S3	1 orang	0,03
9	Tidak sekolah	1.304 orang	33,54
	Jumlah	3888 orang	100

⁵ Buku Monografi Desa Simbang Wetan Bulan April Tahun 2015,
Op. cit. hlm 2

TABEL IV

Drop out untuk usia sekolah⁶

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak tamat SD	17 orang	29,31
2	Tidak tamat SMP	2 orang	3,45
3	Tidak tamat SMA	20 orang	34,48
4	Tidak tamat Akademi / Perguruan Tinggi	19 orang	32,76
	Jumlah	58	100

Dari segi keagamaan, penduduk Desa Simbang Wetan semuanya adalah beragama Islam. Kondisi keagamaan penduduk Desa Simbang Wetan dapat dilihat dari tabel berikut:

⁶ Laporan Bulanan Desa Simbang Wetan Bulan April Tahun 2015.
Op. cit.

TABEL V

Keagamaan penduduk⁷

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	4.964 orang	100
2	Kristen Katholik	-	-
3	Kristen Protestan	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	4.964 orang	100

TABEL VI

Sarana dan prasarana peribadatan⁸

No	Jenis sarana peribadatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Masjid	1 buah	7,14
2	Mushola	13 buah	92,86

⁷ *Ibid.*

⁸ Buku Monografi Desa Simbang Wetan Bulan April Tahun 2015, *Op. cit.*, hlm 3

3	Gereja	-	-
4	Pura	-	-
5	Vihara	-	-
6	Klenteng	-	-
	Jumlah	14 buah	100

B. Pendapat dan Dasar Hukum Pengurus Masjid, Tokoh Agama, Nadzir Tentang Hukum Menukar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid Yang Semula Berupa Masjid Menjadi Halaman Masjid atau Tempat Parkir Untuk Kemaslahatan Masjid Tersebut

Di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, ada sebuah masjid kuno yang terletak di tepi jalan raya, sehingga apabila sewaktu-waktu ada pelebaran jalan paasti masjid tersebut akan digusur. Untuk mengantisipasi hal tersebut, takmir masjid membentuk panitia pembangunan yang melakukan pemugaran total, dengan cara:

- a. Setengah dari masjid tersebut, yaitu bagian depan akan dijadikan halaman dan tempat parkir, karena masjid tersebut tidak mempunyai halaman dan tempat parkir.
- b. Setengah dari masjid bagian depan yang dijadikan halaman tersebut, diganti dengan tanah wakaf yang berada di belakang masjid tersebut. Kemudian masjid yang baru dibuat dua tingkat dan yang kedua tingkat itu berbentuk *letter U*, sehingga masjid menjadi lebih megah dan lebih besar kapasitasnya menampung jama'ah.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada tokoh agama dan pengurus masjid Desa Simbang Wetan, mengenai beberapa hal sebagai berikut

1. Pandangan mengenai hukum menukar tanah wakaf masjid
Untuk menggali informasi tentang bagaimana hukumnya menukar tanah wakaf masjid dan apakah

diperbolehkan meelakukan tindakan merubah tanah wakaf masjid.

Peneliti melakukan wawancara yang pertama adalah dengan Ustad Mansur selaku tokoh agama dan sekaligus selaku wakil nadzir, berikut pendapat beliau:

Boleh, ini kita kebijakannya kalau yang itu resensi madzhab Hambali sama madzhab Hanafi membolehkan penukaran tanah wakaf sepanjang ada kemaslahatan. Dan juga untuk kemaslahatan, kalau sini tidak memiliki parkirán jaman dulu tidak apa-apa, pada saat orang punya sepeda sedikit.⁹

Pendapat bapak H. Sidqi Suchaemi selaku tokoh agama juga sama dengan pendapat Bapak Mansur, sebagai berikut:

Menukar tanah wakaf masjid boleh, karena kami mengacunya terhadap madzhab Hanafi dan Hambali,

⁹ Wawancara dengan Bapak Mansur, tanggal 17 Juni 2015, pukul: 15.39 WIB

terutama untuk kemaslahatan bersama, dan alumni-alumni pondok lain juga sepakat dengan hal ini.¹⁰

Berikut juga pendapat Bapak H. Niti Sumito, beliau selaku tokoh agama dan bendara masjid jami' Simbang wetan:

Menurut kami boleh, karena demi kemaslahatan masyarakat Simbang Wetan yang menginginkan masjid yang lebih besar karena masjid sebelumnya terlalu sempit, maka dilakukan penukaran tanah wakaf lain yang berada di sekitar masjid. Dan menurut madzhab hambali juga memperbolehkan.¹¹

2. Hukum merubah fungsi tanah wakaf masjid

Untuk mengetahui bagaimana hukum merubah fungsi tanah yang semula berupa masjid kemudian menjadi halaman masjid atau tempat parkir.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sidqi Suchaemi, tanggal 23 Juni 2015, pukul: 13.50 WIB

¹¹ Wawancara dengan Bapak H. Niti Sumito, tanggal 23 Juni 2015, pukul: 16.30 WIB

Berikut pendapat Ustad Mansur tentang merubah fungsi halaman masjid:

Bagian yang sekarang jadi halaman ini sudah tidak jadi masjid lagi secara hukum, kalau dulu masjid ini berarti hukum masjid, artinya kamu meludah disitu tidak boleh, setelah masjid ini kita geser kesini (kebelakang) berarti tanah wakaf yang untuk masjid ini sudah hilang, jadi ini sudah bukan masjid lagi. Sebab harus dibedakan antara tanah untuk masjid dengan masjid itu beda. Kalau tanah untuk masjid ini ditanami padi tidak papa, tapi hasil padi nya untuk masjid. Tapi kalau untuk masjid, untuk pembangunan masjid dalam bentuk seperti ini, ini nanti hukumnya bisa untuk i'tikaf, bisa untuk sholat jum'at dan lain sebagainya, kalau disini berbicara tentang hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan yang ada konsekuensi dosanya. Jadi halaman ini adalah hukumnya halaman masjid, bukan masjid lagi. Kalau

ini dihukum masjid ini nanti tidak ada istilah penukaran tanah wakaf jadi cuma pelebaran tanah wakaf. Dulu yang belakang bukan untuk masjid, ini milik wakaf madrasah. Jadi akhirnya yang pihak masjid tukar dengan tanah wakaf madrasah, dan yang madrasah kita kasih dengan tanah wakaf masjid yang lain. Jadi saling tukar menukar, dan yang dulunya masjid ini sekarang dijadikan halaman masjid.¹²

Berikut pendapat Bapak H. Sidqi Suchaemi selaku tokoh agama:

Yang dulu itu merupakan bagian halaman masjid dan yang sekarang menjadi halaman dan tempat parkir itu, maka hukumnya pun sekarang berubah menjadi halaman masjid, jadi wanita yang sedang haid boleh di area halaman tersebut, karena hukumnya sudah berubah bukan hukum masjid lagi.¹³

¹² Wawancara dengan Bapak Mansur, tanggal 17 Juni 2015, pukul: 15.39 WIB

¹³ Wawancara dengan Bapak Sidqi Suchaemi, tanggal 23 Juni 2015, pukul: 13.50 WIB

Berikut juga pendapat Bapak H. Niti Sumito selaku tokoh agama dan bendahara Masjid Jami' Simbang Wetan:

Kami mengacu kepada madzhab hanafi, yang dimana apabila tanah tersebut di putuskan untuk menjadi halaman masjid, maka hukumnya sudah berubah menjadi seperti halaman masjid yang tidak sama dengan hukum masjid.¹⁴

3. Apakah melakukan ijin ke KUA

Untuk mengetahui tentang ijin kepada KUA terhadap perubahan tanah wakaf, berikut hasil wawancaranya:

Berikut pendapat Bapak Musta'in selaku pengurus Masjid Jami' Simbang Wetan:

Tidak, tidak ijin ke KUA.¹⁵

Berikut pendapat Bapak H. Niti Sumito selaku tokoh agama dan bendahara Masjid Jami' Simbang Wetan:

¹⁴ Wawancara dengan Bapak H. Niti Sumito, tanggal 23 Juni 2015, pukul: 16.30 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Mustain, tanggal 17 Juni 2015, pukul: 15.00 WIB

Tidak. Seperti sudah menjadi tradisi, jadi setiap melakukan perubahan harta wakaf kami tidak ijin ke KUA. Hanya rapat dengan pengurus wakaf tersebut.¹⁶

Berikut pendapat Ustad Mansur:

Saya tidak tau mengenai hal itu, itu yang tau orang tua.¹⁷

C. Hukum Menukar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid Dalam Pandangan Hukum Islam

Pada dasarnya tidak ada nash yang sharih yang melarang dan memperbolehkan adanya tukar guling terhadap tanah wakaf sehingga menimbulkan berbagai perspektif hukum dari para mujtahid fiqh yang berbeda. Walaupun pada dasarnya membolehkan namun harus dengan berbagai ketentuan.¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Bapak H. Niti Sumito, tanggal 23 Juni 2015, pukul: 16.30 WIB

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Mansur, tanggal 17 Juni 2015, pukul: 15.39 WIB

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *al-Waqfu*, Dar al-Fikr, Beirut, Libanon, 1971, hlm. 161-170

Makna wakaf adalah berhenti, berhenti dari kepemilikan dari diri sendiri berpindah kepada milik Allah SWT. Maka harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Prinsip wakaf adalah keabadian dan prinsip kemanfaatan.¹⁹

Lebih jelasnya dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِيبْ مَا لَا قُطْ أَعْجِبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: “Tahanlah (jangan jual, hibahkan, atau wariskan) asal (pokok)nya, dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR.Bukhari dan Muslim).²⁰

Majelis Ulama Indonesia mengatakan penukaran harta benda wakaf diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan

¹⁹ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih 3*, cet II, Jakarta: Depag, 1986, hlm 57

²⁰ *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Op, cit., hlm. 62

manfaat wakaf dan diganti dengan nilai yang sepadan atau lebih baik.²¹ Dengan ketentuan, adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif. Hasil wakaf harus digunakan untuk membeli harta wakaf lain sebagai wakaf pengganti. Serta kemanfaatan wakaf pengganti sama dengan benda wakaf sebelumnya atau lebih baik.²²

Penukaran tanah wakaf dalam Undang-undang, dijelaskan bahwa pada dasarnya harta benda wakaf dilarang:

- a) Dijadikan jaminan
- b) Disita
- c) Dihibahkan
- d) Dijual
- e) Diwariskan
- f) Ditukar, atau

²¹ Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama' Keputusan Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se Indonesia III*, Jakarta : MUI, 2009. Dalam Komisi B Ijma' Ulama' Komisi fatwa Se Indonesia III Tentang Masa'il Fiqhiyah Mu'ashirah, hlm. 44

²² *Ibid.*

g) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.²³

Dalam KHI dijelaskan tentang adanya kemungkinan diperbolehkannya hal tersebut, sebagaimana berikut:

- 1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf.
- 2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh Wakif.
 - b. Karena kepentingan umum.²⁴

²³Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op. cit.*, hlm 197-198

²⁴ *Ibid*, hlm. 312

Pendapat imam mahdzab tentang penukaran harta wakaf sebagai berikut:

1. Imam Maliki

Imam Malik berpendapat tidak boleh menukar harta benda wakaf yang terdiri dari benda tak bergerak, walaupun benda itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tetapi ada sebagian yang berpendapat golongan Imam Maliki membolehkan penukaran harta benda tidak bergerak lainnya supaya tidak sia-sia.²⁵

Imam Maliki juga membedakan jenis benda wakaf kaitannya dengan menjual benda wakaf tersebut:

- a. Apabila harta wakaf berwujud masjid, maka tidak boleh dijual.
- b. Apabila berbentuk harta tidak bergerak, maka tidak boleh dijual sekalipun hancur dan tidak boleh diganti dengan jenis yang sama, tetapi boleh dijual dengan syarat

²⁵ *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hlm 67

dibelian lagi sesuai kebutuhan untuk memperluas masjid atau jalan umum.

- c. Dalam bentuk benda lain dan hewan, apabila sudah tidak ada manfaatnya maka boleh dijual dan hasil penjualannya dibelian barang atau hewan sejenis.

2. Imam Syafi'i

Pendapat Imam Syafi'i hampir sama dengan pendapat Imam Maliki, yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf. Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh.²⁶

Dasar hukum yang digunakan adalah hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, ditukar, dan diwariskan.²⁷

3. Imam Hanafi

Imam Hanafi tidak menentukan hukumnya mengenai perubahan benda wakaf. Karena kedua sahabatnya berselisih pendapat, menurut pendapat Abu Yusuf tidak boleh menjual

²⁶ *Ibid*, hlm 68

²⁷ Farid Wajdy dan Mursid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm 151

benda wakaf meskipun rusak, sedangkan menurut pendapat Muhammad bin al- Hasan dikembalikan kepada pemiliknya yang pertama.²⁸

Imam Hanafi membolehkan menukar tanah wakaf dengan tiga hal, yaitu:

- a. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar.
- b. Apabila benda wakaf itu tidak dapat dipertahankan lagi.
- c. Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.²⁹

4. Imam Hambali

Sedangkan Imam Hambali lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Menurut Hanbali wakaf yang sudah hilang

²⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abddurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2010, hlm 308

²⁹ Ahmad Rofiq, *Op. cit.*, hlm 519

manfaatnya boleh dijual dan uangnya dibeliakan yang seperti semula.³⁰

Ibnu Taimuyah misalnya, mengatakan tentang kebolehan mengganti, menjual, mengubah, dan memindahkan benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapat maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.³¹

Argumentasi yang dikemukakan Ibnu Taimiyah sangat praktis dan rasional. Karena:

1. Tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengajukan contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fi sabilillah, setelah perang selesai kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dama kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan

³⁰ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abddurrahman ad-Dimasyqi, *Op. cit.*, hlm. 307

³¹ Farid Wajdy dan Mursid, *Op. cit.*, hlm. 152

hasilnya dibelikan suatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan.

2. Karena kepentingan maslahat yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun masjid baru yang lebih luas dan lebih baik.³²

Dalam hal ini, mengacu kepada tindakan Umar bin Khattab, ketika ia memindahkan Masjid Kufah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Utsman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap Masjid Nabawi.³³

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah Juz III*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, 530

³³ *Ibid*, hlm. 531-532

BAB IV

ANALISIS HUKUM MENUKAR DAN MERUBAH FUNGSI TANAH WAKAF MASJID DESA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN

A. Analisis Pendapat dan Dasar Hukum Pengurus Masjid, Tokoh Agama, Nadzir Tentang Hukum Menukar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Yang Semula Berupa Masjid Menjadi Halaman Masjid atau Tempat Parkir Untuk Kemaslahatan Masjid

Pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwa menukar dan merubah fungsi tanah wakaf Masjid Desa Simbang Wetan, untuk memperluas bangunan masjid dan membangun halaman parkir. Karena bangunan masjid yang sebelumnya kurang memiliki bangunan yang kecil dan tidak memiliki halaman parkir.

Berdasarkan kesepakatan antara pengurus masjid dengan pengurus tanah wakaf di desa tersebut, sepakat untuk menukar bangunan madrasah yang berada di belakang masjid

dengan tanah wakaf milik masjid yang berada di tempat lain, dan bangunan madrasah tersebut di jadikan untuk memperluas bangunan masjid.

Dari beberapa data yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya istilah perubahan harta wakaf dalam ilmu perwakafan, pengurus masjid, nadzir dan tokoh agama di Desa Simbang Wetan berusaha memandang perubahan itu sebagai suatu jalan keluar untuk mempertahankan harta wakaf. Sehingga perubahan terhadap harta wakaf harus dilakukan pada setiap praktek perwakafan. Perubahan harta wakaf sendiri menurut pemaparan mereka hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan dengan tujuan untuk melestarikan nilai manfaat yang terkandung pada setiap harta wakaf dan untuk kemaslahatan masyarakat. Bentuk dari perubahan harta wakaf sendiri bisa berupa perubahan dalam bentuk wujud atau fisiknya maupun perubahan fungsi pemakaiannya.

Tindakan menukar dan merubah fungsi halaman masjid merupakan sesuai dengan keinginan masyarakat desa tersebut, dengan memperluas bangunan masjid dan memperluas halaman depan masjid yang digunakan untuk tempat parkir dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat ketika beribadah di masjid.

Apabila kita cermati peristiwa di atas, maka dapat kita pahami bahwa penukaran dan perubahan fungsi tanah wakaf masjid tersebut memang harus dilakukan karena kalau tidak masjid tersebut tidak memiliki halaman dan tempat parkir yang sesuai untuk para jama'ah.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab III, bahwa dalam hukum menukar dan merubah fungsi tanah wakaf masjid terjadi beberapa pendapat antara para ulama madzhab. Beberapa persyaratan di ungkapkan oleh para ulama madzhab tentang hukum menukar dan merubah fungsi halaman masjid.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak boleh merubah harta benda wakaf yang berbentuk benda-benda

tidak bergerak, walaupun benda tersebut akan rusak dan tidak menghasilkan sesuatu. Sedangkan untuk benda bergerak membolehkan, karena dengan adanya penukaran maka benda itu tidak sia-sia

Ulama Hanafiyah mengajukan tiga syarat, yaitu apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar, apabila benda wakaf itu tidak dapat dipertahankan lagi, jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.

Ulama Syafi'iyah sangat ketat sekali dalam hal perubahan harta benda wakaf, karena wakaf itu sifatnya mengikat, abadi, dan tidak bisa ditarik kembali atau diperjual belikan, digadaikan, diwariskan, dan dihibahkan oleh wakif sekalipun wakaf itu telah rusak dan hilang manfaatnya. Karena wakaf itu bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan adalah hadist Nabi yang diriwayatkan Umar,

bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ
الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِْبْ مَا لَا قُطَّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ
أَتَصَدَّقَ بِهَا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّعُمْ : أَحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا . (رواه
البخارى ومسلم)¹

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: “Tahanlah (jangan jual, hibahkan, atau wariskan) asal (pokok)nya, dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Ulama Hanabillah lebih tegas lagi, tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid.

¹ *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Op. cit.*, hlm. 58

Menurut Hambali wakaf yang sudah hilang manfaatnya boleh dijual dan uangnya dibelikan seperti semula. Ibnu Taimiyah misalnya, mengatakan tentang kebolehan nya mengganti, menjual, mengubah, dan memindahkan benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapat maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

Dasar yang meraka gunakan adalah tindakan sahabat Umar bin Khattab ra yang memindahkan Masjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi para penjual kurma. Ini adalah penggantian tanah masjid, adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka sahabat Umar dan Utsman pernah membangun Masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan melakukan tambahan serta perluasan.²

Dari pendapat di atas, penulis sepakat dengan pendapat Ibn Taimuyah yaitu wakaf boleh ditukar, dijual, diubah, dan dipindahkan asalkan demi kepentingan umum dan

² Depag RI, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006, hlm. 81

apabila memang benar-benar dibutuhkan. Sesuai dengan peristiwa penukaran dan perubahan fungsi tanah wakaf Masjid di Desa Simbang Wetan yang harus dilakukan demi kemaslahatan warga di desa tersebut.

Perubahan harta wakaf menurut ahli fiqih dari kalangan Hanafi dan Hanbali ini diantaranya adalah Imam Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah berpendapat boleh menjual harta wakaf, atau menukarnya, menggantinya, memindahkannya harta wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi (seperti karena rusak atau sebab lain) dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kemudian digunakan lagi bagi kepentingan wakaf, kebolehan itu, baik dengan alasan supaya tetap maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar/lebih baik bagi kepentingan manusia pada umumnya.

Amalan wakaf akan bernilai ibadah, bila harta wakaf dapat memenuhi fungsinya. Apabila harta wakaf mengalami penyusutan, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya

sebagaimana tujuan semula, maka harus dicari solusi supaya harta wakaf itu tetap berfungsi.

Harta wakaf itu abadi dan harus dijaga serta dipelihara sesuai dengan jenis barang dan cara pemeliharaan yang disyaratkan wakif. Wakaf tersebut boleh dijual, dipindahkan, dirubah atau diganti untuk kemudian untuk diatur kembali pemanfaatannya bagi kepentingan umum, sesuai dengan tujuan wakaf. Landasan utama dari kebolehan tersebut adalah agar benda wakaf itu tetap memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Dalam Fiqh dikenal dengan prinsip maslahat, yaitu memelihara maksudnya, yakni memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan. Prinsip ini setidaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan perubahan status harta benda wakaf untuk mencapai fungsinya sebagaimana dinyatakan oleh wakif, dari pada dipertahankan tetapi berakibat tidak berfungsinya aset wakaf tersebut.

Kondisi suatu barang sudah tidak berguna karena rusak, maka benda itu tidak dapat di ambil manfaatnya, penukaran benda menjadi suatu kebutuhan untuk mengembalikan manfaat yang ada.

Apabila benda masih bisa dijual, dan apabila taksiran dari penjualan benda tersebut bisa digunakan untuk membeli barang yang kemanfaatannya minimal sama dengan benda terdahulu, maka hal ini justru lebih baik. Sebab tidak menghilangkan segi kemanfaatan dari benda tersebut walaupun jika dilihat dari segi bentuk benda sudah berubah namun tidak menghilangkan substansi dari benda itu sendiri.

Berbeda dengan benda yang sudah rusak, benda tersebut tidak dapat memberi manfaat. Mempertahankan benda yang sudah rusak sama halnya mempertahankan hilangnya tujuan dari benda itu sendiri.

Menjaga nilai manfaat yang terkandung di dalam harta wakaf itu sangatlah penting, agar manfaat dari harta wakaf tersebut tetap bisa dinikmati, untuk menghindari

terjadinya kemubadziran atas harta wakaf kedepannya, dan merupakan tanggung jawab seorang nadzir terhadap harta wakaf dan kepada wakif yang telah mengamanatkan harta wakaf tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 225 dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 pasal 11 dijelaskan bahwa pertukaran wakaf pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaan khusus perubahan hanya dapat dilakukan ketika telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yang alasannya meliputi:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif,
- b. Karena kepentingan umum.

Melihat aturan diatas, dapat dipahami bahwa perubahan yang dilakukan oleh pengurus Masjid Desa Simbang Wetan dalam menukar dan merubah fungsi tanah wakaf masjid belum bisa dibenarkan. Karena tidak melalui

prosedur dan aturan yang telah dibuat di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Proses menukar dan merubah fungsi tanah wakaf hanya dilakukan dengan cara sederhana, seperti proses akad yang dilakukan pada saat terjadinya wakaf. Tidak melakukan ijin ke KUA.

Menurut penulis bahwa menjaga nilai manfaat dalam harta wakaf sangatlah penting, karena mengingat tanggung jawab kepada wakif dan berkaitan juga dengan tujuan wakaf itu sendiri. Akan tetapi apabila terdapat harta wakaf yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah kurang berfungsi atau bahkan tidak berfungsi, maka demi kepentingan dan prinsip kemaslahatan serta tercapai dan terpenuhinya tujuan wakaf itu sendiri, maka benda tersebut sebaiknya dilakukan suatu perubahan sehingga manfaat yang dirasakan terus bersambung sebagai amal jariyah bagi si wakif.

B. Analisis Hukum Menukar dan Merubah Fungsi Tanah Wakaf Masjid dalam Pandangan Hukum Islam.

Seperti yang dijelaskan dalam bab III, bahwa status tanah wakaf masjid Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan telah memiliki status hukum yang sah baik menurut hukum fiqh Islam maupun menurut undang-undang. Karena memiliki sertifikat tanah yang sah. Akan tetapi mengenai status tanah sebagai tanah wakaf, harta wakaf masjid tersebut tidak memiliki hukum yang sah menurut undang-undang, karena berdasarkan pengurus sampai sekarang ini belum didaftarkan kepada PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)

Di dalam Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 17 disebutkan bahwa:

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

- 2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Dalam pasal 18 menyebutkan:

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Dalam pasal 19 menyebutkan:

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal di atas, menjelaskan bahwa Nazhir berkewajiban mendaftarkan tanah wakaf kepada PPAIW setelah dilakukan Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa tanah wakaf milik Masjid Desa Simbang Wetan Kecamatan buaran Kabupaten Pekalongan, menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa dalam pembuatan wakaf dikatakan sah apabila telah didaftarkan kepada PPAIW, setelah pembuatan Akta Ikrar Wakaf yang disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam KHI pasal 223 menyebutkan:

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- 2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

- 3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- 4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Dalam KHI pasal 224 menyebutkan:

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nazhir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

Dalam hal menukar dan merubah fungsi tanah wakaf juga di atur dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004, dalam pasal 36 menyebutkan:

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Mengenai perubahan status harta benda wakaf, dalam pasal 40 menyebutkan:

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. dijadikan jaminan
2. disita
3. dihibahkan
4. dijual
5. diwariskan
6. ditukar
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Dalam pasal 41 menyebutkan:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 nomer 6 dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR)

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- 4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan

harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

Izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Undang-undang tentang perwakafan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak lain adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, tentang perwakafan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat betul-betul memahami dan menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan itu.

Dalam perubahan harta wakaf itu sendiri tidak terlepas dari pentingnya menjaga nilai manfaat, sebelum harta wakaf tersebut rusak seorang nadzir mempunyai kewajiban untuk mengelola dan memelihara, akan tetapi apabila harta wakaf memerlukan adanya perubahan, seorang nadzir juga mempunyai hak untuk melakukan perubahan baik keadaan ataupun bentuk harta wakaf sehingga menjadi lebih baik dan

bermanfaat, apabila nadzir menghendakinya. Dalam perubahan harta wakaf itu sendiri tidak terlepas dari pentingnya menjaga nilai manfaat, sebelum harta wakaf tersebut rusak seorang nadzir mempunyai kewajiban untuk mengelola dan memelihara, akan tetapi apabila harta wakaf memerlukan adanya perubahan, seorang nadzir juga mempunyai hak untuk melakukan perubahan baik keadaan ataupun bentuk harta wakaf sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat, apabila nadzir menghendakinya.

Berdasarkan penelitian para nadzir dan tokoh agama Desa Simbang Wetan telah memahami betapa pentingnya menjaga manfaat yang ada pada harta wakaf yaitu dengan cara pengelolaan yang benar dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari nadzir dan sangat penting untuk dijaga karena berdampak dengan kelangsungan nilai manfaat daripada harta wakaf tersebut, yang pada akhirnya berkaitan dengan tanggung jawabnya kepada wakif.

Dalam penerapan pengelolaan terhadap harta wakaf yang sudah mengalami perubahan. Sudah jelas dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan KHI yang mengatur tentang perwakafan. Bahwa dalam menukar dan merubah fungsi tanah wakaf Masjid Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan hanya dilakukan melalui kesepakatan bersama antara nadzir, tokoh agama dan warga sekitar. Tanah wakaf Masjid tersebut belum mempunyai status hukum yang sah karena belum didaftarkan melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf oleh Nadzhir untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abddurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2010.
- al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia, Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Hajj, Imam Abi Muslim Ibnu, *Sahih Muslim Juz 2*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Aalamiyah, tth.
- Al-Hussaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad, *Kifayah al-Akhyar Juz 1*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988.
- Al-Mugniyah Muhammad Jawad, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah ‘ala Mazahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-‘Ilm al-Malayin, 1964.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2006.
- Buku monografi desa simbang wetan bulan april tahun 2015.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih 3*, cet II, Jakarta: Depag, 1986.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesi*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2005.

Direktorat Jenderal Perkembangan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Fyzee, Asaf A. A., *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tintamas, 1966.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat pres, 2005.

Halim, Mohammad Abdul, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988.

Haq, A. Faishal dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: PT. GBI, 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: Amanah, 2002.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2011.

Laporan bulanan desa simbang wetan bulan april tahun 2015.

Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama' Keputusan Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se Indonesia III*, Jakarta : MUI, 2009.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 3, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, Cet. ke-7.

Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.

Nawawi, Hasan, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet II, 1995.

PP No. 28 tahun 1977 *Tentang Perwakafan Tanah Milik*

Praja, Junaya S., *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1997.

Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-I 2004.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2011.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Wajdy, Farid dan Mursid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Wawancara dengan Bapak H. Niti Sumito, tanggal 23 Juni 2015, pukul: 16.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Mansur, tanggal 17 Juni 2015, pukul: 15.39 WIB.

Wawancara dengan Bapak Mustain, tanggal 17 Juni 2015, pukul:
15.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sidqi Suchaemi, tanggal 23 Juni 2015,
pukul: 13.50 WIB.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Waqfu*, Dar al-Fikr, Beirut, Libanon,
1971.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **AGUS HIDAYATULLAH**

NIM : 102111071

Fakultas : Syari'ah


Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014
di Kabupaten Semarang dengan nilai :

84

4,0 / A

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor,
Ketua


Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

KECAMATAN BUARAN

DESA SIMBANG WETAN

Alamat : Desa Simbang Wetan, Kec Buaran, Kab Pekalongan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Simbang wetan, menerangkan bahwa :

Nama : Agus Hidayatullah

Universitas : UIN WALISONGO SEMARANG

Judul Penelitian : **HUKUM MENUKAR DAN MERUBAH FUNGSI TANAH WAKAF
MASJID (Studi Kasus di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan)**

Bahwa judul penelitian tersebut di atas merupakan kasus yang benar-benar ada di Desa Simbang wetan.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Kepala Desa Simbang Wetan



MUHAMMAD KHAIRUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

KECAMATAN BUARAN

DESA SIMBANG WETAN

Alamat : Desa Simbang Wetan, Kec Buaran, Kab Pekalongan

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Simbang wetan, menerangkan bahwa :

Nama : Agus Hidayatullah

Universitas : UIN WALISONGO SEMARANG

**Judul Penelitian : HUKUM MENUKAR DAN MERUBAH FUNGSI TANAH WAKAF
MASJID (Studi Kasus di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan)**

Bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Desa Simbang wetan pada tanggal
16 juni – 16 juli 2015

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya, terima
kasih.

Kepala Desa Simbang Wetan



MUHAMMAD KHAIRUDDIN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Agus Hidayatullah

Tempat, Tanggal lahir : Batang, 30 Mei 1994

Alamat Kost : Jalan Tanjungsari Rt 1 Rw 5 No. 19
Ngaliyan Semarang

Alamat Asal : Ds. Pujut Rt 4 Rw 2 Kec. Tersono Kab.
Batang

Pendidikan Formal :

- Tamat TK Siwi Kartini II Pujut Lulus Tahun 1997
- Tamat SDN Pujut 01 Lulus Tahun 2004
- Tamat SMPN 1 Limpung, Batang Lulus Tahun 2007
- Tamat SMAN 1 Subah, Batang Lulus Tahun 2010
- Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang angkatan 2010

Pendidikan Non Formal :

- Tamat Madrasah Diniyah Awaliyah Islamiyah Tarbiyatul
Athfal Pujut Lulus Tahun 2005

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 November 2015

Agus Hidayatullah
102111071